

**HAK NUMPANG KARANG DI TINJAU DARI PERSPEKTIF
FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum Islam Di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

SKRIPSI



OLEH :

ERWIN SUPRAPTO
NIM. 10622003735

PROGRAM SI

**JURUSAN MUA'MALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul” **HAK NUMPANG KARANG DI TINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH** (Studi Kasus Di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura) “skripsi ini dilatar belakangi oleh tindakan masyarakat Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak yang meminjam tanah umum/tanah sosial Desa untuk berkebun dan untuk mendirikan bangunan rumah pribadi, permasalahannya bolehkah masyarakat memanfaatkan tanah tersebut, karena tanah sosial ini, sebenarnya hanya untuk mendirikan fasilitas umum saja.

Batasan masalah agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat maka penulis menfokuskan pada masalah pelaksanaan hak numpang karang dan bagaimana analisa hak numpang karang menurut perspektif Fiqih Muamalah

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak numpang karang di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura, sudah sesuaikah dengan hukum Islam. Dan untuk mengetahui bagaimana analisa hak numpang karang ditinjau dari perspektif Fiqih Muamalah.

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, dan yang menjadi subjek adalah orang yang melaksanakan numpang karang di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura, objeknya adalah pelaksanaan hak numpang karang, yang menjadi, populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura, yang terlibat dalam pelaksanaan numpang karang, yang berjumlah 11 Orang, dan dalam mengumpulkan datanya penulis menggunakan metode. Observasi, yaitu mengamati langsung ke lokasi penelitian. Interview, yaitu wawancara langsung kepada pemuka masyarakat yang dipandang sebagai narasumber/kepada yang terlibat langsung dalam pelaksanaan numpang karang ini. Angket, yaitu menyebarkan sejumlah pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk diisi sesuai dengan alternative jawaban yang ada. Dan yang penulis pakai dalam analisis data ini adalah data kuantitatif yaitu data yang berasal dari angket dan dijelaskan melalui tabel, sedangkan data kualitatif data yang berasal dari wawancara dan obserfasi yang dijelaskan dengan cara menghubungkan antara satu fakta dengan fakta yang lainnya kemudian kedua data itu dianalisa untuk diambil kesimpulan. Dan penulisan dalam penelitian ini menggunakan tiga metode penulisan yaitu metode. Deduktif adalah menguraikan permasalahan secara umum untuk menarik kesimpulan secara khusus metode. Induktif adalah mencari data khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode Deskriptif adalah dengan jalan menggunakan data-data apa adanya, kemudian dianalisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian.

Hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa pelaksanaan numpang karang di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. dalam pelaksanaan ini belum sesuai dengan hukum Islam, dan pelaksanaan numpang karang ini masih dilaksanakan sampai sekarang ini, dan apabila ditinjau dari. Perspektif Fiqih Muamalah dalam pelaksanaan numpang karang ini yang dilaksanakan di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura. Setelah diteliti sebenarnya dalam numpang karang ini dibenarkan oleh hukum Islam, karena membantu masyarakat yang tidak mampu, namun dalam pelaksanaannya dianggap belum sesuai dengan tata cara yang dianjurkan dalam hukum Islam ini dapat dilihat dari, tata cara pelaksanaannya tidak disertai dengan. Akad dan tidak

mementukan jangka waktunya sampai kapan si peminjam boleh memanfaatkan lahan tersebut.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
----------------------	----------

KATA PENGANTAR.....	iii
----------------------------	------------

DAFTAR ISI.....	vi
------------------------	-----------

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisa.....	11

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Demografis.....	12
B. Pendidikan dan Kehidupan Beragama.....	15
C. Sosial Ekonomi Masyarakat.....	18
D. Adat Istiadat.....	21

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG HAK NUMPANG KARANG DAN ARIYAH (PINJAM-MEMINJAM)

A. Pengertian Hak Numpangkarang Dalam Hukum Perdata.....	22
B. Pinjam-Meminjam Dalam Fiqih Muamalah.....	28

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK NUMPANG KARANG PADA MASYARAKAT DESA SRIGADING

A. Pelaksanaan Hak Numpang Karang	43
---	----

B. Tinjauan Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Hak Numpang Karang di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura.....	51
---	----

BAB V : KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam kepemilikan merupakan masalah penting kepemilikan dalam Islam berlaku bagi zat maupun manfaat dari suatu benda. Kebebasan keselamatan dijamin oleh hukum perdata maupun hukum syara. Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia sangat menghargai hak milik pribadi dan kebebasan mengembangkannya serta mencari keuntungan yang besar, tetapi hak milik tersebut harus sesuai dengan hukum syara seperti yang sudah diatur dalam Islam. Salah satu aturan dalam Islam itu adalah masalah Muamalah, jika kita berbicara masalah Muamalah berarti membicarakan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya dalam kehidupan yang berkaitan dengan harta, kecenderungan manusia terhadap harta yang begitu besar sering menimbulkan persengketaan, jika tidak diatur maka dapat menimbulkan ketidak setabilan dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hak milik merupakan sesuatu yang dimiliki untuk dapat dipergunakan dan dapat dimanfaatkan atau pemilikannya berhak dan bebas untuk melakukan apa saja yang diinginkan terhadap miliknya. Tetapi hak milik juga bisa berahir/hilang disebabkan oleh terjadinya transaksi jual beli, hak *intifa* yaitu akan berahir dengan batas waktu², didalam hukum Islam juga dijelaskan bagaimana cara memperoleh hak, antarlain: jual beli, tukar menukar, infak, sedekah, hadiah, wasiat, wakaf, warisan, hibah, zakat dan ihyaulmawat³

Hukum Islam juga tidak secara khusus membedakan mana titel/cara memperoleh hak yang hanya untuk tanah saja, dan mana untuk benda lain nontanah pada hakekatnya, segala

¹ Amir syarifudin, *Gari-garis Besar Fiqih*, (Jakarta timur: Kencana, 2003), cet. ke-1, h. 176.

² Hasneni, *Fiqih Muamalah*, (STAIN Bukit Tinggi Press: 2002), cet. Ke-3, h. 36.

³ H.Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet .ke-2, h. 15.

[illegible]

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah SWT.

1. Dengan pemilikan
2. Karena perlekatan
3. Karena daluarsa
4. Karena pewarisan, baik menurut Undang-Undang maupun menurut surat wasiat
5. Dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas sesuatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.⁵

⁴ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Diponegoro: al-Quran Hikmah, 2007), cet. Ke-1, h. 49.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa, hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa⁶, Hak kebendaan memiliki sifat mutlak kepada orang yang berhak terhadap benda yang jadi sasaran hak itu, suatu penguasaan tertentu yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Dengan itu hak kebendaan lantas berhadapan dengan hak pribadi (hak perorangan).⁷

Dari penjelasan ayat dan perundang-undangan di atas sangat jelas bahwa setiap manusia dalam memiliki harta musti dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh hukum positif dan hukum Islam. Namun ada juga beberapa individu masyarakat yang kurang paham terhadap hukum, seperti pada masyarakat. Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura yang melaksanakan numpang karang.

Di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam, mayoritas penduduknya adalah warga transmigrasi, dari Jawa pada tahun 1986, dan sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani kelapa sawit, karena di daerah tersebut cocok untuk tanaman berjangka panjang. Namun tidak semua masyarakat memiliki ladang pribadi sehingga ada beberapa individu masyarakat yang melaksanakan numpang karang di tanah umum/tanah sosial Desa, tanah ini adalah tanah pemberian dari pemerintah untuk fasilitas Desa seperti

⁵ H.Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, *op.cit*, h. 17.

⁶ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paraminta, 2007), cet. Ke-38, h. 171.

⁷ H.F.A.Voolmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali, 1992), cet. Ke-2, h. 189.

yang sudah berdiri saat ini. Sekolah SD, Sekolah MDA, Sekolah TK, Kantor Desa, Puskesmas Desa. Karena masih banyak sisa tanah yang kosong dan tidak terawat oleh Desa, jadi karena itulah ada sebagian individu masyarakat yang meminjam tanah tersebut untuk berkebun dan mendirikan bangunan rumah pribadi⁸ Permasalahannya bolehkah tanah fasilitas umum yang sudah lama tidak terawat ini digunakan untuk mendirikan bangunan rumah pribadi, dan untuk berkebun.

Dengan adanya problem di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul: ***HAK NUMPANG KARANG DI TINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH*** (Studi Kasus di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura)

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat maka penulis memfokuskan pada masalah pelaksanaan hak numpang karang dipandang menurut perspektif Fiqih Muamalah di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan penjelasan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak numpang karang di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura?
2. Bagaimana analisa hak numpang karang menurut perspektif Fiqih Muamalah di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura?

⁸ Sujarwo, (kepala Desa Srigading), wawancara di Desa Srigading, tanggal, 1 Februari 2010.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak numpang karang di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisa hak numpang karang ditinjau dari perspektif Fiqih Muamalah di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura.

3. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- b. Sebagai pengembangan wawasan serta cakrawala berfikir dan untuk menjadi bahan bacaan bagi pihak yang terkait terutama masyarakat Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura.
- c. Sebagai kontribusi pemikiran pada almamater dimana penulis menuntut ilmu.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dari pembahasan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Dalam memperoleh data yang diperlukan, penulis mengamati langsung ke lokasi penelitian/lapangan, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura.

1. Lokasi penelitian

Untuk Penelitian lapangan ini penulis menentukan lokasi di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura. Alasan penulis memilih lokasi ini karena pelaksanaan numpang karang perlu dilihat lebih jauh melalui suatu penelitian ini, Dan untuk menambah kesempurnaan penelitian ini juga, penulis merujuk pada buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah Orang yang melaksanakan numpang karang di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura.

b. Objek penelitian

Yang menjadi objek penelitian penulis adalah pelaksanaan hak numpang karang.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura yang terlibat dalam pelaksanaan numpang karang, yang berjumlah 11 Orang, karena jumlah populasinya jelas dan dapat diketahui dan populasinya kurang dari seratus orang maka menentukan populasi dan sampelnya menggunakan sensus.

4. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, Penulis menggunakan data primer dan data skunder.

- a. Data primer yaitu data yang penulis kumpulkan langsung dari responden atau sumber data lapangan yakni yang terlibat langsung dalam meleksanakan numpang karang.
- b. Data skunder yaitu data yang melalui bacaan atau buku-buku (*literature-literatur*) serta data penunjang lainnya yang sangat mendukung proses penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Di samping penelitian penulis ini adalah yang bersifat lapangan maka pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian ini di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura.
- b. Interview, penulis mengadakan wawancara langsung yang diarahkan kepada pemuka masyarakat yang dipandang sebagai narasumber.
- c. Angket, yaitu penulis menyebarkan sejumlah pertanyaan yang secara tertulis kepada responden untuk diisi sesuai dengan alternative jawaban yang ada.

6. Metode Analisa Data

Metode yang penulis pakai dalam analisis data adalah kuantitatif dan kualitatif, data kuantitatif yaitu data yang berasal dari angket dan data ini dijelaskan melalui *tabulasi* (tabel), sedangkan data kualitatif berasal dari wawancara dan observasi yang dijelaskan dengan cara menghubungkan antara satu fakta dengan fakta yang lainnya kemudian kedua data itu dianalisa untuk diambil kesimpulan.

7. Metode Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan tiga metode penulisan yaitu:

- a. Metode Deduktif, yaitu menguraikan permasalahan secara umum untuk menarik kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu mencari data khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum .
- c. Metode Deskriptif, yaitu dengan jalan menggunakan data-data yang diperlukan apa adanya, kemudian dianalisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis membagi penulisan ini kepada beberapa bab yaitu:

BAB I : Bab ini berisikan latar belakang masalah, permasalahan, batasan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisikan sejarah singkat Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura yang terdiri dari geografinya, pendidikan dan kehidupan beragama, sosial ekonomi serta adat istiadat.

BAB III : Bab ini terdiri dari pengertian Hak numpang karang dalam dasar Hukum Islam.

BAB IV : Bab ini berisikan tentang pelaksanaan hak numpang karang di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura, hak numpang karang, ditinjau menurut perspektif Fiqih Muamalah.

BAB V : Terdiri Dari Kesimpulan Dan Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Demografis

Desa Srigading adalah salah satu Desa dari tujuh Desa yang terdapat di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura di Provinsi Riau. Desa Srigading terdiri dari tiga Kadus (Kepala Dusun), 6 RW dan 18 RT, jarak dari Desa Srigading ke Kecamatan Lubuk Dalam, ± 6 Km dan jarak dari Desa Srigading ke Kabupaten Siak ± 40 Km, dan jarak Desa Srigading ke Ibu Kota Propinsi Riau (Pekanbaru) ± 130 Km.

Adapun batas-batas wilayah Desa Srigading dan luasnya adalah sebagai berikut:

a. Batas wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Propinsi
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Buana Makmur
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Empang Baru
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rawang kao¹

Inilah batas-batas Desa Srigading yang menghubungkan dari Desa ke Desa lainnya yang ada di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura, adapun luas area Desa Srigading Sebagai Berikut:

b. Luas wilayah

- a. Luas wilayah : 1.350 Km

¹ Data/Profil Desa Srigading, 2 April 2010

- b. Tanah Pekarangan : 131,5 Ha
- c. Tanah Perkebunan : 818 Ha
- d. Tanah Sosial/Umum : 10 Ha
- e. Dan lain-lain : 298,5 Ha²

Keadaan Topografi Desa

Secara umum keadaan topografi Desa Srigading adalah merupakan dataran tinggi. Dan beriklim, tropis.

Desa Srigading termasuk Desa mandiri, selama ini pembangunan di Desa Srigading dikerjakan secara serempak karena jiwa persaudaraan masyarakat sangat kuat, dan Desa ini dinamai Desa Srigading.³

Melihat keadaan topografi Desa Srigading, kondisi permukaan tanah dan iklim, maka Desa Srigading memiliki potensi pertanian. Pada khususnya tanaman jangka panjang seperti kelapa sawit dan lain-lain.

Berdasarkan data dari kantor Kepala Desa, Desa Srigading dihuni oleh 2287 Penduduk atau 584 KK yang terdiri dari 1192 Laki-Laki dan 1095 Perempuan dengan rincian sebagai mana di bawah ini:

TABEL I

Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

² Data/Profil Desa Srigading, 2 April 2010

³ Puji, (Sekertaris Desa srigading), *wawancara* di Desa Srigading, tanggal, 1 April 2010.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	1192	53,5
2	Perempuan	1095	46,5
Jumlah		2287	100 %

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Srigading Tanggal, 2 April 2010

Jika dilihat tabel di atas maka tampak jelas bahwa. Penduduk Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura lebih banyak kaum Lelaki di mana kaum Perempuan terdiri dari 1095 jiwa, 46,5 % sedangkan jumlah jenis Kelamin Laki-Laki 1192 jiwa ,atau 53,5 %. Dari keterangan tabel di atas sudah jelas bahwa penduduk Desa Srigading lebih banyak kaum laki-lakinya.

B. Pendidikan dan Kehidupan Beragama Masyarakat

1. Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Srigading relatif masih rendah sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

TABEL II

Jumlah Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	jumlah (orang)
Tidak Sekolah	823
SD/Madrasah	612
SMP/Sederajat	488
SMA/SMK/Sederajat	323
Strata 1(S1)	41
Jumlah	2287

Sumber Data: kantor kepala Desa Srigading Tanggal, 2 April 2010

Bangsa yang ingin maju adalah bangsa yang mengedepankan pendidikan rakyatnya. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting, di mana ilmu pengetahuan ini dapat meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkualitas dapat memajukan bangsa. Agar pendidikan berjalan lancar maka diperlukan fasilitas ataupun sarana pendidikan yang memadai, adapun fasilitas ataupun sarana pendidikan Desa Srigading sebagai berikut:

TABLE III

Sarana Pendidikan di Desa Srigading

No	Jenis Pendidikan	Jumlah

1	PAUD	1 UNIT
2	TK	1 UNIT
3	MDA	1 UNIT
4	SD	1 UNIT
5	SMP	-
6	SMA	-
Jumlah		4 Unit

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Srigading Tanggal, 2 April 2010

Melihat tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sarana ataupun fasilitas pendidikan di Desa Srigading sudah termasuk memenuhi standar untuk ukuran Desa karena Desa Srigading pernah beberapa kali mendapat bantuan dari. Pemerintah Daerah untuk mendirikan bangunan-bangunan dan untuk fasilitas umum contohnya seperti bangunan pendidikan dan lain-lain, itu disebabkan majunya pola pikir masyarakat Desa Srigading dan kerja sama masyarakatnya dalam gotong royong untuk memajukan Desa, dan akhirnya sekarang masyarakat Srigading dapat menuai hasil yang dikerjakannya selama ini.

2. Kehidupan Beragama.

Agama merupakan petunjuk dan jalan yang menjadi barometer dalam menempuh kehidupan di dunia yang fana ini. Dengan selalu berpegang pada agama maka seseorang akan mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat.

Masyarakat Desa Srigading beragama Islam, dan ada yang beragama Kristen, Islam 99 % sedangkan yang beragama Kristen 1 % masyarakat Srigading tergolong taat beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang beragama Islam sering menjalankan sholat berjamaah di mesjid dan mushola-mushola, Hal ini terbukti dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang dijalankan masyarakat Srigading, pada ibu-ibu PKK Setiap hari jumat sore menjalankan wirit rutin dari rumah kerumah, sedangkan kaum Lelaknya selalu menjalankan wirit rutin juga dari rumah kerumah setiap malam jumat, dan pemuda-pemudinya juga aktif dalam kegiatan keagamaan seperti mengajarkan ngaji sama anak-anak kecil, dan kegiatan ini sudah berjalan sejak dahulu. Dan yang beragama Kristen menjalankan ibadahnya setiap hari minggu pagi ke Gereja.⁴

Adapun sarana tempat ibadah di Desa Srigading dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

TABEL IV

Jumlah Sarana Ibadah di Desa Srigading.

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3 buah
2	Mushola	12 buah
3	Gereja	1 buah
Jumlah		16 buah

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Srigading Tanggal, 2 April 2010

⁴ Sujarwo, (Kepala Desa Srigading), wawancara di Desa Srigading, tanggal, 1 April 2010.

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat sarana peribadahan Desa Srigading sudah cukup terlaksana dengan baik, hal ini terbukti dengan adanya Mushola yang terdiri dari 12 buah, Masjid 3 buah dan Gereja 1 buah.

C. Sosial Ekonomi Masyarakat

Masalah sosial dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan adanya rasa saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang satu dengan yang lain saling melakukan transaksi ekonomi, dimana dalam transaksi tersebut mereka saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain sehingga terjadilah sosialisasi.

Masyarakat Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam memiliki rasa sosial yang sangat tinggi, rasa sosial yang terbentuk antara satu sama yang lainnya saling memerlukan dan juga merasakan sepekerjaan, yang terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti, gotong royong, bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dan banyak aktifitas yang lainnya yang mereka lakukan bersama-sama. Tetapi pada umumnya masyarakat Desa Srigading cukup beragam namun didominasi oleh para petani pekebun, sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini:

TABEL V

Jumlah Mata Pencaharian/Ekonomi Masyarakat Srigading

Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
Pegawai Negeri Sipil	15
Guru	27
Petani	673
Industri	27
Pedagang	23
Jasa Lainnya	553
Tidak Bekerja	25
Jumlah	1343

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Srigading Tanggal, 2 April 2010

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa masyarakat Desa Srigading memiliki mata pencaharian yang berpariasi diantara mata pencaharian yang paling dominan adalah petani, dan jasa lainnya, dari sisi profesi sebagai petani, masyarakat dalam hal ini ada yang bertani ditanah milik sendiri dan ada pula yang bertani ditanah Sosial/Tanah Desa.⁵

⁵ Data/Profil Desa Srigading, 2 April 2010.

D. Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan ciri-ciri suatu masyarakat, Desa Srigading pada umumnya warga transmigrasi dari Jawa yang ditempatkan di Desa Srigading pada tahun 1986 sehingga masyarakat Desa Srigading beradat-istiadat Jawa atau sistim kekerabatannya yang kita kenal Parental, (mengikuti garis keturunan bapak). Pada umumnya penduduk disini sangat memegang teguh adat istiadat Jawa, ini dapat dilihat dari pelaksanaan adat istiadat diantaranya pada acara:

- a. Khitanan
- b. Perkawinan
- c. Syukuran
- d. Kematian
- e. Memperingati Muharam (Satu Sura) dan lain-lain.⁶

Adapun bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari adalah bahasa Jawa dan Nasional. Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat Desa Srigading selalu mengembangkan kepedulian sosial dalam mewujudkan cita-cita bersama hal ini biasa diwujudkan dalam bentuk gotong royong dan tolong menolong antar sesama.⁷

⁶ Puji, (Sekertaris Desa Srigading), *wawancara* di Desa Srigading, tanggal, 1 April 2010.

⁷ Sujarwo, (Kepala Desa Srigading), *wawancara* di Desa Srigading, tanggal, 2 April 2010.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG HAK NUMPANG KARANG DAN ARIYAH (PINJAM-MEMINJAM)

A. Pengertian Hak Numpang Karang Dalam Hukum Perdata

a. Pengertian

Hak numpang karang adalah suatu hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung. Bangunan-bangunan dan penanaman di atas tanah orang lain, (Pasal 711).¹ Dan dapat diketahui bahwa dari jenis-jenis hak atas tanah yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) undang-undang pokok agraria yang berbunyi:

(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 KUHP ialah:

- a. Hak milik
- b. Hak guna usaha
- c. Hak guna bangunan
- d. Hak pakai
- e. Hak sewa
- f. Hak membuka tanah
- g. Hak memungut hasil hutan
- h. Hak-hak yang lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan diterapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.²

Dari keterangan pasal 16, di atas dijelaskan pengertian-pengertian secara terperinci yang dijelaskan pada pasal-pasal berikut ini:

Pasal 20

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op.cit*, h. 197.

² Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Hak-hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana 2007), cet. Ke-1, h. 29.

(1) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6

Pasal 27

Hak milik hapus bila:

1. Tanahnya jatuh kepada Negara
 - a. Karena percabutan hak
 - b. Karena penyerahan sukarela oleh pemiliknya
 - c. Karena ditelantarkan
2. Tanahnya musnah.

Tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari pada haknya.

Pasal 28

(1) Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagai mana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

Pasal 34

Hak guna usaha hapus karena:

- a. Jangka waktunya berakhir
- b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi

- c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir
- d. Dicabut untuk kepentingan umum
- e. Ditelantarkan
- f. Tanahnya musnah

Pasal 35

(1) Hak guna bangunan adalah untuk mendirikan dan mempunyai atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

Pasal 40

Hak guna bangunan hapus karena

- a. Jangka waktunya berakhir
- b. Diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi
- c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir
- d. Dicabut untuk kepentingan umum
- e. Ditelantarkan
- f. Tanahnya musnah

Pasal 41

(1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan ini.

Pasal 42

Yang dapat mempunyai hak pakai adalah

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia
- c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan yang berkedudukan di Indonesia
- d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia

Pasal 44

(1) Seseorang atau sesuatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.

Yang dapat menjadi pemegang hak sewa adalah:

- a. Warga Negara Indonesia

- b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia
- c. Badan hukum yang didirikan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia

Pasal 46

(1) hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga Negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hak-hak dalam hukum adat yang menyangkut tanah. Hak-hak ini perlu diatur dengan peraturan pemerintah demi kepentingan umum yang lebih luas daripada kepentingan orang atau masyarakat hukum yang bersangkutan³.

Berdasarkan definisi dan penjelasan di atas dapat disimpulkan secara etimologi bahwa hak numpang karang merupakan hak sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang untuk dapat mendirikan bangunan dan penanaman di atas tanah orang lain atau tanah pemerintah, tetapi harus dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh hukum positif.

Adapun Tujuan undang-undang pokok agraria, didalam Negara republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraria, bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia tuhan yang maha Esa

³ Gunardi, Markus Gunawan, *Kitab Undang-Undang Hukum Kenotarisan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), cet. Ke-1, h. 29-39.

mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan⁴.

B. Pinjam Meminjam Dalam Fiqih Muamalah

a. Pengertian Ariyah (pinjam-meminjam)

Menurut etimologi ariyah adalah (العارية) diambil dari kata (عار) yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat ariyah berasal dari kata (التعاور) yang sama artinya dengan (التناول والتناوب) saling menukar dan mengganti yakni dalam tradisi pinjam-meminjam.⁵

Sedangkan menurut terminologi syara Ulama Fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

1. Menurut Syarkhasyi dan Ulama Malikiyah sebagai berikut:

غليك المنفعة بغير عوض

*Artinya: Pemilikan manfaat terhadap sesuatu tanpa ganti rugi.*⁶

2. Menurut Ulama Syafi'iah dan Hambaliah:

اباحة المنفعة بلا عوض

*Artinya: "Pembolehan untuk mengambil manfaat tanpa mengganti"*⁷

⁴ Ibid, h. 9.

⁵ H. Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), cet. Ke-4, h. 139.

⁶ <http://makalah-fifacom.blogspot.com/2010/02/pinjam-meminjam.html>

⁷ *ibid*

Dalam penjelasan ayat di atas bahwa. Dalam mengambil manfaat barang yang dipinjam yang meminjam boleh mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya hanya sekedar menurut izin, dari yang punya atau kurang dari yang diizinkan. Umpama dia meminjam tanah untuk menanam padi, dia diperbolehkan menanam padi dan yang sama umurnya dengan padi, atau yang kurang, seperti kacang. Tidak boleh dipergunakan untuk tanaman yang lebih lama dari padi, kecuali kalau tidak ditentukan masanya, maka dia boleh bertanam menurut kehendaknya dan peminjaman ini boleh untuk siapa saja.⁸

b. Rukun Dan Syarat Ariyah

1. Rukun Ariyah

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun ariyah hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun ariyah.

Menurut Ulama Safi'iyah dalam ariyah disyaratkan adanya lafazh shighat akad yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin.

Secara umum jumhur Ulama Fiqih menyatakan bahwa rukun ariyah ada empat yaitu:

1. Mu'ir, (peminjam)
2. Musta'ir, (yang meminjamkan)
3. Mu'ar, (barang yang dipinjam)

⁸ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), cet. Ke-1, h. 324.

4. Shinghat, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

2. Syarat Ariyah

Ulama Fiqih mensyaratkan dalam akad ariyah sebagai berikut:

a. Mu'ir berakal sehat

Dengan demikian, orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan, sudah baliqh sedangkan. Ulama lainnya menambahkan bahwa yang berhak meminjamkan adalah orang yang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya tanpa dipaksa, bukan anak kecil, bukan orang bodoh, dan bukan orang yang sedang pailit (bangkrut).⁹

b. Barang yang dipinjam bukan jenis barang yang apabila dimanfaatkan akan habis atau musnah, seperti makanan. Jenis-jenis barang yang tidak habis atau musnah bila dimanfaatkan antara lain adalah rumah, tanah, pakaian dan binatang ternak kecuali apabila dihabiskan atau dimusnahkan.

c. Manfaat barang yang dipinjam itu termasuk manfaat yang mubah (dibolehkan syara), misalnya, apabila meminjam kendaraan orang lain kendaraan itu hendaknya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam pandangan syara, seperti digunakan untuk mengunjungi karib kerabat dalam rangka silaturahmi atau digunakan untuk mengantarkan jemaah haji dari satu Desa. Apabila kendaraan itu digunakan untuk pergi ketempat maksiat, maka peminjam dicela oleh syara sekalipun akad ariyah pada dasarnya sah, ia dicela karena pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan syara. Contoh peminjaman yang tidak

⁹ H. Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, op.cit, h. 141.

bermanfaat bahkan merugikan dalam pandangan syara adalah meminjamkan senjata dengan segala perangnya kepada kafir harbi (orang kafir yang sedang berperang dengan Negeri muslim), karena senjata ini nantinya akan mereka gunakan untuk memerangi umat Islam.¹⁰

d. Pemegang barang oleh peminjam

Ariyah adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah.

e. Barang (*musta'ar*) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika *musta'ar* tidak dapat dimanfaatkan, akad tidak sah. Para Ulama telah menetapkan bahwa ariyah diperbolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian binatang dan lain-lain.¹¹

c. Dasar Hukum Ariyah

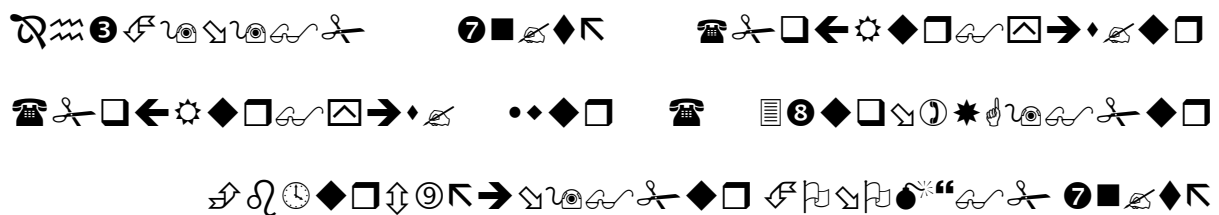
Para Ulama Fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan hukum asal akad ariyah, apakah bersifat pemilikan terhadap manfaat atau hanya sekedar kebolehan memanfaatkannya. Ulama Hanafiah dan Malikiyah mengatakan bahwa ariyah merupakan akad yang menyebabkan peminjam “Memiliki manfaat” barang yang dipinjam, peminjaman itu dilakukan secara sukarela tanpa imbalan dari pihak peminjam oleh sebab itu pihak peminjam berhak untuk meminjamkan barang itu kepada orang lain untuk dimanfaatkan karena manfaat barang itu telah menjadi miliknya kecuali apabila pemilik barang

¹⁰ H. Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), cet. Ke-1, h. 240.

¹¹ H. Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, *op.cit*, h. 142.

membatasi pemanfaatannya bagi peminjam saja atau pemilik barang itu melarang peminjam untuk meminjamkannya kepada orang lain.

Akan tetapi Ulama Syafi'iyah Hambaliyah dan Abu al-Hasan al-Kharkhi, pakar Fiqih Hanafi berpendapat bahwa akad ariyah itu hanya bersifat kebolehan memanfaatkan benda itu. Oleh sebab itu pemanfaatannya hanya terbatas bagi pihak peminjam dan dia tidak boleh meminjamkannya kepada orang lain. Namun demikian seluruh Ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa pihak peminjam tidak boleh menyewakannya kepada orang lain.¹² Adapun landasan hukumnya dari nash al-Quran ialah:



*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan (al-Maidah: 5 Ayat 2)*¹³

Dengan penjelasan ayat tersebut bahwa kita harus saling tolong menolong dalam kebaikan. Tetapi hukumnya bisa menjadi wajib bagi seorang muslim yang dengan

¹² H. Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, op.cit, h. 241.

¹³ Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, op.cit, h. 49.

terpaksa harus meminjamkan sesuatu yang sangat dibutuhkan kepada saudaranya sesama muslim yang tidak membutuhkannya. Ada juga beberapa ketentuan hukum tentang ariyah :

1. Sesuatu yang dipinjam haruslah sesuatu yang mubah (dibolehkan). Jadi seseorang tidak boleh meminjamkan budak wanita kepada orang lain untuk digauli atau seseorang tidak boleh meminjamkan seorang muslim untuk melayani orang kafir atau meminjamkan barang yang diharamkan, karena kerja sama dalam perbuatan dosa hukumnya diharamkan. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam firmanya:



Artinya: dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.(al-Maidah: 5 Ayat 2)¹⁴

2. Jika pemberi pinjaman mensyaratkan bahwa peminjam diwajibkan mengganti barang yang dipinjamnya jika terjadi kerusakan, maka peminjamnya wajib menggantinya, berdasarkan Sabda Nabi,

المسلمون على شرطهم

“Orang-orang muslim wajib menepati persyaratan yang telah disepakati oleh mereka”(HR. Abu Daud dan alhakim)¹⁵

¹⁴ Ibid, h. 49.

¹⁵ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shohih Sunah Abudaud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. Ke-2, h. 502.

Sedangkan jika pemberi pinjaman tidak mensyaratkan, kemudian barang pinjaman itu rusak tetapi bukan karena kecerobohan peminjam dan tidak disengaja, maka peminjam tidak diwajibkan menggantinya, tetapi dianjurkan untuk menggantinya berdasarkan Sabda. Rosulullah yang ditujukan pada salah seorang Istri beliau yang telah memecahkan mangkok, seperti diterangkan oleh hadis berikut ini:

طعام بطعام وانية با نية

“makanan harus diganti dengan makanan dan wadah harus di ganti dengan wadah”(HR. at-Tarmizi, al-Bukhari, dengan lafazh berbeda)¹⁶

3. Peminjam harus menanggung biaya transportasi barang yang dipinjam saat mengembalikannya kepada pemiliknya, jika pengangkutan itu memerlukan biaya.
4. Peminjam tidak boleh menyewakan barang yang dipinjamnya. Adapun meminjamkan lagi kepada orang lain maka tidak jadi masalah jika pemiliknya mengijinkan.
5. Jika seseorang meminjam tembok untuk mendirikan sebatang kayu misalnya, maka ia tidak boleh meminta pengembalian kecuali tembok tersebut roboh. Begitu juga dengan orang yang meminjamkan sawah untuk ditanami maka ia tidak boleh meminta pengembalian sawahnya kecuali tanaman yang diatasnya dipanen terlebih dahulu karena meminta pengembalian tembok dan sawah dalam kasus tersebut di atas dapat menimbulkan mudharat sedangkan menimbulkan mudharat bagi seorang muslim hukumnya haram.

¹⁶ Imam Abi Abdilah Bin Ismail Dkk, *Soheh al- Bukhari, Jilid 5*, (Beirut an-Nasri: Darul Fikri, 1994), cet. Ke-3, h. 241.

6. Barang siapa meminjamkan barang sampai batas waktu tertentu maka dianjurkan baginya untuk tidak meminta pengembalianya kecuali setelah habis masa peminjaman.¹⁷

d. Tanggung Jawab Peminjam

Bila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak ia berkewajiban menjaminnya baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena yang lainnya,

Kecuali apabila meminjam untuk pekuburan maka pinjaman itu tidak boleh dikembalikan sebelum hilang bekas-bekas mayat, berarti sebelum mayatnya hancur menjadi tanah dia tidak boleh meminta kembali. Atau meminjamkan tanah untuk menanam padi, ringkasnya keduanya boleh memutuskan akad asal tidak merugikan salah seorang diantara keduanya. Akad ariyah pun putus karena salah seorang dari yang meminjam dan yang meminjamkan mati, begitu juga karena gila. Maka apabila yang meminjam mati ahli warisnya wajib mengembalikan barang pinjaman dan tidak halal bagi mereka memakainya, kalau mereka pakai juga, mereka wajib membayar sewanya. Kalau yang meminjamkan dengan yang meminjam berselisih (yang pertama mengatakan belum dikembalikan, sedangkan yang kedua mengaku sudah mengembalikannya), maka yang meminjamkan dibenarkan dengan sumpahnya, karena yang asal belum kembali. Dan sesudah yang meminjam mengetahui bahwa yang meminjamkan sudah memutuskan akad, dia tidak boleh memakai barang yang dipinjamnya.¹⁸

e. Hak-Hak Peminjam

¹⁷ Syaikh Abubakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Madinah: Maktabatul'ulum Wal hikam, 1419h), cet. Ke-6, h. 504-505.

¹⁸ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, op.cit*, h. 325.

Persoalan lain yang dibahas oleh para Ulama adalah dari segi kualitas dan kuantitas pemanfaatan barang itu oleh peminjam apakah secara mutlak ia boleh memanfaatkan barang itu, atau dalam bentuk terbatas sesuai dengan bentuk izin orang yang meminjamkan. Dalam persoalan ini terdapat perbedaan pendapat Ulama Fiqih. Menurut jumhur Ulama, pemanfaatan barang itu oleh peminjam terbatas pada sejauh mana izin pemanfaatan yang diberikan oleh pemiliknya.

Akan tetapi, Ulama Hanafiah membedakan antara ariyah yang bersifat mutlak dengan ariyah yang bersifat terbatas. Menurut mereka, apabila peminjaman dilakukan secara mutlak, berarti peminjam berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keinginannya, baik dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan keluarganya maupun dipinjamkan untuk dimanfaatkan orang lain. Misalnya, apabila seseorang meminjam mobil yang penggunaan, waktu dan tempatnya tidak dibatasi oleh pemiliknya, maka, menurut Ulama Hanafi'iyah, peminjam boleh memakainya ditempat mana saja selama yang ia inginkan, serta meminjamkannya pula kepada orang lain. Akan tetapi, apabila pemanfaatan barang itu, menurut adat kebiasaan setempat, telah melampaui batas dan dalam pemanfaatan itu barang rusak, maka kerusakan itu harus ditanggung oleh peminjam, baik kerusakan itu disebabkan pemanfaatannya sendiri maupun karena pemanfaatan orang lain yang telah diberikan izin.

Akan tetapi, apabila pemilik barang memberikan pinjaman barang dengan batasan waktu, tempat dan pemakaian, maka peminjam terikat dengan syarat-syarat yang

ditentukan pemilik itu. Apabila syarat itu tidak ia laksanakan, maka segala resiko kerugian barang pinjaman itu menjadi tanggung jawab peminjam, karena peminjam telah lalai dan melanggar ketentuan peminjaman yang diberikan pemilik barang.¹⁹

f. Tanah Yang Di Pinjam Untuk Dibuat Bangunan Atau Ditanami

Tentang pengembalian tanah yang dipinjam untuk didirikan diatasnya suatu bangunan atau ditanami pohon, Ulama Hanafi'iyah berpendapat, jika ariyah bersifat mutlak, *mu'ir* dapat memintanya kembali kapanpun ia mau, sebab menurut golongan ini, ariyah adalah akad tidak lazim. Oleh karena itu peminjam dapat dipaksa untuk mencabut pohon yang ada atau merobohkan bangunan bila hal itu memudharatkan *mu'ir*, dan *mu'ir* tidak menanggung harga pohon dan bangunan tersebut. *Mu'ir* tidak dapat disalahkan oleh *musta'ir* dengan alasan akad mutlak, tetapi *musta'ir* yang dipandang oleh salah satu sebab membawa sesuatu yang mutlak dalam waktu yang lama.

Jika ariyah bersifat temporer atau dibatasi waktu, *mu'ir* berhak meminta kembali tanahnya, namun dimakruhkan mengambilnya sebelum habis waktunya karena terdapat pengingkaran janji dari *mu'ir*. *Mu'ir* juga tidak berhak untuk memaksa peminjam untuk mencabuti tanaman dan merobohkan bangunannya. Pada keadaan itu, peminjam berhak *khiyar* (memilih), antara *mu'ir* menaggung harga tanaman dan bangunan karena ia telah merusak akad dengan mengambil tanah sebelum waktunya atau peminjam mencabut pohon dan merobohkan bangunannya hal itu tidak akan dapat menyebabkan kerusakan pada tanah. Akan tetapi, jika akan menyebabkan kerusakan pada tanah, *mu'ir* berhak *khiyar* antara mengambil tanaman dan bangunan dengan memberikan penggantian yang senilai dengan keduanya, atau *mu'ir* merelakan pada tanamannya. Hal ini sesuai dengan

¹⁹ H. Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, op.cit, h. 241.

pendapat al-Hakim Syahid dalam mukhtasarnya. Adapun menurut al-Qadrawi, *mu'ir* menaggung kerusakan pada tanah atau tanaman yang dicabut atau bangunan yang dirobohkan sebab itu telah menipu peminjam berkenaan dengan waktu pinjaman barang. Dengan demikian, yang harus diperhatikan adalah penepatan janji serta menjaga kemudharatan yang akan diterima oleh peminjam.

Adapun jika seseorang peminjam tanah untuk pertanian, tanah tersebut tidak boleh diambil sebelum panen, baik pinjam-meminjamnya dibatasi waktu atau tidak. Hal ini karena pertanian mempunyai batas tertentu yang jelas. Berbeda dengan penanaman pohon, menurut Imam Malik, pohon boleh dicabut untuk menghindari kemudharatan sebab tidak jelas kapan akan berahirnya.

Ulama Malikiyah berpendapat, yang benar bahwa seseorang yang meminjamkan barang kepada orang lain dapat meminta kembali kapanpun ia mau jika transaksinya bersifat mutlak. Adapun jika transaksinya terikat, baik dengan syarat atau adat, ia tidak boleh memintanya sebelum habis waktu. Dengan demikian, jika meminjam tanah pertanian, baik untuk pendirian bangunan atau penanaman pohon, sekalipun waktunya belum habis, *mu'ir* boleh mengambil kembali tanah tersebut dan boleh pula memiliki pohon dan bangunan jika ia membayar kepada peminjam sesuai dengan nilai dari bangunan dan nilai pohon tersebut.

Pada transaksi ariyah, seperti di atas, yakni yang memakai batas waktu atau syarat, pemberi pinjaman (*mu'ir*) tidak dapat mengambil tanah tersebut sebelum waktunya, sebelum

memberikan ganti rugi kepada peminjam atas biaya yang dikeluarkan untuk membangun atau menanam pohon tersebut akan tetapi, jika waktu atau persyaratan telah habis pemilik tanah dibolehkan khiyar antara menyuruh peminjam untuk menjadikan tanah seperti semula atau menaggunag biaya untuk mencabut pohon dan merobohkan bangunan. Hal ini jika pohon dan bangunan itu memiliki nilai setelah dirusak atau dicabut sedangkan peminjam tidak mampu untuk membiayainya.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, pada transaksi ariyah mutlak yang tidak disebutkan batas waktunya peminjam dapat memanfaatkan tanah tersebut selama *mu'ir* tidak memintanya. Jika ia memintanya setelah didirikan bangunan atau setelah ditanami pohon, dan disyaratkan ketika akad bahwa peminjam harus mencabut pohon atau merobohkan bangunan, maka peminjam harus melakukannya. Jika tidak disyaratkan waktu akad, *mu'ir* lah yang harus melakukannya.

Selain itu, peminjam harus meratakan kembali tanah yang telah dipinjamnya jika hal itu disyaratkan dalam transaksi. Jika tidak disyaratkan tidak ada kewajiban baginya, sebab persetujuan *mu'ir* untuk merobohkan bangunan untuk mencabut pohon menunjukkan kerelaan tentang rusak dan berlobangnya tanah miliknya.²⁰

Beragamnya pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Fiqih di atas dapat disimpulkan bahwa menurut ulama Syafi'iyah, Hanafiah, dan Hanabilah, *mu'ir* dapat menarik kembali tanah yang dipinjam untuk mendirikan bangunan dan menanam pohon, sedangkan pada ariyah tanah yang dipakai untuk pertanian pengembaliannya bergantung pada pengganti yang senilai dari tanah tersebut. Adapun menurut Ulama Malikiyah, pemilik tanah dapat meminta tanah jika transaksi bersifat mutlak apabila terikat, ia tidak boleh memintanya sebelum batas waktu yang ditentukan.

²⁰ H. Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, *op.cit*, h. 146-148.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK NUMPANG KARANG PADA MASYARAKAT DESA SRIGADING

A. Pelaksanaan Numpang Karang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain diberbagai aspek kehidupan supaya mereka saling tolong-menolong, dalam hubungan sesama makhluk sosial, seperti tolong-menolong dari segi ekonomi, tukar-menukar barang, jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau berusaha dengan cara lain baik itu untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan/kemaslahatan umum.¹Semua transaksi yang dilakukan tersebut tercakup dalam hukum Islam, Seperti praktek numpang karang yang dilakukan di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura, yang sudah berlangsung sejak lama dan dalam numpang karang ini masyarakat sangat merasa terbantu dengan adanya numpang karang tersebut, didalam hukum Islam numpang karang disamakan dengan al-Ariyah yang artinya, memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang boleh diambil manfaatnya dengan tetapnya benda tersebut setelah diambil manfaatnya, sehingga orang yang memanfaatkannya dapat mengembalikan kepada pemiliknya.²

Berdasarkan keterangan dari tokoh masyarakat setempat, bahwa numpang karang di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura ini sudah dilakukan sejak tahun 1999 sampai sekarang, karena sampai sekarang tanah tersebut belum diminta oleh pemerintah Desa setempat oleh karena itu masyarakat masih melakukan numpang karang ditanah sosial ini, namun seandainya tanah tersebut akan dibutuhkan oleh pemerintah Desa

¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam, op.cit*, h. 278.

² Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet. Ke-1, h. 493.

untuk mendirikan fasilitas umum masyarakat siap tidak siap harus meninggalkan pelaksanaan numpang karang ini karena biar bagaimanapun tanah tersebut tanah sosial tanah yang seharusnya dibuat untuk mendirikan fasilitas-fasilitas umum, namun dalam hal ini pemerintah Desa juga menyadari karena tanah tersebut belum dikelola penuh oleh Desa setempat sehingga pemerintah Desa tidak mempersalahkan hal numpang karang tersebut namun pemerintah Desa juga sudah memberitahukan kepada masyarakat yang terlibat numpang karang bahwa dalam numpang karang ini masyarakat juga harus mengetahui apabila pemerintah membutuhkan masyarakat harus siap meninggalkan tanah sosial tersebut.

Kesepakatan sampai kapan masyarakat boleh memanfaatkan lahan yang ditanami, boleh dimanfaatkan sampai kapan karena tidak disebutkan melalui akad, untuk lebih jelasnya kita lihat jawaban responden yang terlibat numpang karang di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura yang melakukan pelaksanaan numpang karang berikut ini.

Jawaban responden yang terlibat numpang karang di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura, yang berjumlah sebelas orang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan numpang karang ini tidak disebutkan jangka waktunya sampai kapan si peminjam diperbolehkan untuk memanfaatkan lahan tersebut yang sudah dikelola oleh masyarakat yang terlibat numpang karang. Dari hasil data yang diperoleh dari lapangan, dapat kita ketahui bahwa hak numpang karang pada Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura masih belum jelas status pemanfaatannya apakah diperbolehkan atau tidak oleh pemerintah Desa setempat karena dalam pelaksanaannya tidak disertai dengan akad, dan karena lahannya belum dikelola secara maksimal oleh pemerintahan Desa setempat, Sebagaimana diungkapkan oleh kepala Desa Srigading bahwa

masyarakat yang terlibat numpang karang sampai saat ini tidak disertai akad karena masyarakat langsung mengelola lahan tersebut, dan sampai saat ini belum ditentukan jangka waktunya, akan tetapi apabila pihak pemerintah Desa sewaktu-waktu membutuhkan lahan tersebut masyarakat harus siap meninggalkan lahan yang dimanfaatkanya tersebut.³

Sedangkan jawaban responden yang terlibat numpang karang di Desa Srigading yang berjumlah sebelas orang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan numpang karang ini tidak disebutkan adanya akadnya dan hal ini dapat merugikan kedua belah pihak yang pertama pihak pemerintah Desa apabila sewaktu-waktu membutuhkan tanah tersebut akan sulit untuk mengambil kembali tanah itu karena tanah tersebut masih dalam pemanfaatan peminjam yang tidak disertai akad.

Pihak kedua bagi peminjam juga akan sulit juga dalam pemanfaatan tanah tersebut karena tidak disertai akad sewaktu-waktu pemerintah Desa membutuhkan, masyarakat harus siap meninggalkan tanah tersebut, seharusnya dalam pelaksanaan numpang karang ini harus disertai akad karena akad suatu kebolehan sampai kapan peminjam boleh memanfaatkan lahan tersebut itulah yang seharusnya yang dilakukan sama pemerintah Desa agar tidak ada kesalah pahaman dikemudian hari, ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Desa dan masyarakat yang terlibat numpang karang di tanah sosial Desa Srigading tersebut, namun pada kenyataannya tidak seperti apa yang diinginkan.

Sedangkan jawaban responden yang terlibat numpang karang di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura yang berjumlah sebelas orang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan numpang karang tidak adanya syarat-syarat tertentu dalam pelaksanaan numpang karang ini, memang dalam numpang karang tidak perlu adanya syarat-syarat tertentu yang dibutuhkan dalam numpang hanyalah akad, karena masyarakat

³ Sujarwo, (Kepala Desa Srigading), *Wawancara* di Desa Srigading, tanggal, 02 April 2010.

mengira mereka hanya numpang namun dalam numpang karang juga ada aturan-aturannya yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang terlibat numpang karang yaitu kebolehan sampai kapan masyarakat boleh numpang karang, dan hasil wawancara dari kepala Desa bahwa masyarakat yang numpang karang tidak ada izin dari pemerintah Desa mereka langsung menggarap dan mendirikan bangunan untuk tempat tinggal, dan memanfaatkan lahan tersebut semau masyarakat yang terlibat numpang karang.⁴ Ini juga yang sangat disesalkan oleh pemerintah Desa karena kurang pahamnya masyarakat dalam pelaksanaan numpang karang ini kemudian.

Jawaban responden yang terlibat numpang karang di Desa Srigading yang berjumlah sebelas orang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan numpang karang disebabkan oleh faktor ekonomi, inilah salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Srigading dalam pelaksanaan numpang karang ini, karena penghasilan ekonomi yang rendah masyarakat melaksanakan numpang karang di tanah sosial Desa. Dan hasil wawancara dari pemerintah Desa, menyatakan bahwa masyarakat yang melaksanakan numpang karang dikarenakan oleh faktor ekonomi.⁵ itulah hasil wawancara dengan masyarakat yang terlibat numpang karang kemudian.

Jawaban responden yang terlibat numpang karang di Desa Srigading yang berjumlah sebelas orang mengatakan tentang pelaksanaan numpang di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam tidak dikenakan pajak oleh pemerintah Desa karena hal ini disebabkan pemerintah Desa melihat bahwa masyarakat yang melaksanakan numpang karang belum ada yang berhasil, sehingga dikhawatirkan jika dikenakan pajak akan memberatkan bagi masyarakat yang melakukan numpang karang, selain lahan yang dikelola bebas oleh masyarakat yang numpang karang, masyarakat juga mengatakan dalam pelaksanaan numpang

⁴ Sujarwo, (Kepala Desa Srigading), *Wawancara* di Desa Srigading, tanggal, 03 April 2010.

⁵ Puji, (Sekertaris Desa Srigading), *wawancara* di Desa Srigading, tanggal, 03 April 2010.

karang, masyarakat juga tidak mendapat bantuan perawatan lahan dari pemerintah Desa ini disebabkan karena masyarakat yang numpang karang tidak minta izin terlebih dahulu oleh pemerintah Desa sehingga pemerintah Desa tidak begitu memperhatikan masyarakatnya yang terlibat numpang karang di tanah sosial tersebut, dan Pendapat responden apabila tanah tersebut suatu saat diambil oleh pemerintah Desa, apakah mereka meminta ganti rugi atau tidak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL I

Jawaban Responden Yang Terlibat Numpang Karang, Mengatakan Ragu-Ragu Bahwa Dalam Pelaksanaan Numpang Karang Kalau Bangunan Dan Tanaman Yang Sudah Dirawat Diminta Oleh Pemerintah Desa?

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Ya	2	20
2	Tidak	3	30
3	Ragu-ragu	6	50
Jumlah		11	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang terlibat pelaksanaan numpang karang di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura, 2 responden (20%), 3 responden (30%), dan 6 responden (50%) beberapa keterangan dari responden 2 responden menjawab meminta ganti rugi dan 3 responden menjawab tidak meminta ganti rugi, dan 6 responden menyatakan ragu-ragu dari jawaban masyarakat yang menjawab ragu-ragu mereka menyadari bahwa seandainya pemerintah Desa meminta lahan tersebut mereka harus siap pindah karena masyarakat merasa salah dalam pelaksanaan ini

tidak meminta izin terlebih dahulu. Dan pemanfaatan ini juga secara cuma-cuma sehingga suatu saat apabila diambil oleh pemerintah Desa maka mereka akan memberikannya dengan suka rela, karena numpang karang ini sifatnya hanya sementara dan kebolehan mengambil manfaat dari tanah tersebut, adapun jawaban masyarakat yang terlibat numpang karang, mereka tidak mengetahui tentang hukum dan hak numpang karang ini, sehingga masyarakat langsung-langsung saja dalam pemanfaatan tanah tersebut dan ini dapat kita lihat pada tabel berikut ini tentang jawaban responden mengenai masalah hukum numpang karang:

TABEL II

Jawaban Responden Yang Terlibat Numpang Karang, Mengatakan Bahwa Dalam Pelaksanaan Numpang Karang Tidak Tahu Tentang Hukum Numpang Karang?

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Ya	-	-
2	Tidak	8	70
3	Ragu-ragu	3	30
Jumlah		11	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang terlibat numpang karang di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura, 3 responden (30%), menjawab bahwa mereka ragu-ragu dalam menjawab pengertian hukum numpang karang, dan 8 responden (70%) menjawab tidak tahu tentang hukum numpang karang karena mereka tidak tahu sama sekali masalah hak numpang karang. Dari data di atas dapat kita simpulkan bahwa keseluruhan dari responden yang terlibat numpang karang yang berjumlah, 11 orang, mereka semuanya tidak mengetahui mengenai hukum, dan hak numpang karang tersebut oleh

karena itu masyarakat yang terlibat numpang karang memanfaatkan tanah sosial ini dengan bebas.

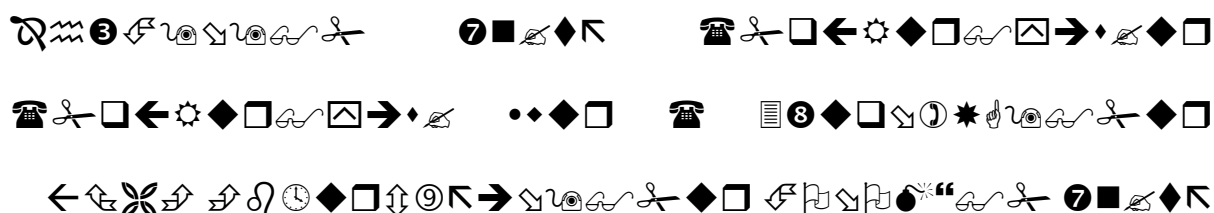
Adapun jawaban responden yang terlibat numpang karang yang berjumlah sebelas orang menjawab sebelum melakukan pelaksanaan numpang karang responden mengatakan bahwa dalam pelaksanaan numpang karang tidak dipungut biaya dikarenakan masyarakat yang numpang karang rata-rata masyarakat yang berpenghasilan rendah oleh karena itu tidak dipungut biaya dalam numpang karang ini, adapun jawaban responden tentang pelaksanaan numpang karang ini yang berjumlah sebelas orang menjawab dalam pelaksanaan numpang karang ini mereka atas inisiatif sendiri tanpa dipaksa atau disuruh oleh pemerintah Desa karena sepengetahuan masyarakat yang terlibat numpang karang mereka memanfaatkan lahan Desa yang kosong tidak dirawat oleh Desa sehingga masyarakat memanfaatkan lahan tersebut, dan dalam pelaksanaannya masyarakat yang terlibat numpang karang tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah Desa untuk pemanfaatan lahan tersebut, seharusnya biarbagai manapun masyarakat yang numpang karang haruslah mendapat izin terlebih dahulu agar dalam pelaksanaan numpang karang bisa berjalan dengan mudah seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah Desa dan yang melakukan numpang karang juga dapat memanfaatkan lahan tersebut dengan leluasa tanpa adanya kekuatiran dalam memanfaatkan lahan tersebut.

B. Tinjauan Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Hak Numpang Karang Di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura

Numpang karang dalam Hukum Islam diperbolehkan sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan aturan-aturan yang diterapkan dalam hukum Islam. Konsep numpang karang dalam hukum Islam sama dengan al-Ariyah (pinjam-meminjam), yaitu pinjaman yang diberikan kepada seseorang yang dapat memanfaatkan hingga jangka waktu tertentu, lalu

setelah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Dan setelah diambil manfaatnya masih tetap zatnya.⁶

Dalam pelaksanaan numpang karang ini yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura, karena disebabkan dari faktor ekonomi sehingga masyarakat dapat dibenarkan dalam melaksanakan numpang karang ini, numpang karang didalam hukum Islam disamakan dengan al-Ariyah (pinjam-meminjam) dalam konsep Fiqih Muamalah sementara, asal yang dilakukan dengan cara perbuatan tidak dengan cara lisan dan pemerintah Desa adalah pihak yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk menguasai tanah tersebut, sehingga pemerintah Desa berhak memberikan izin terhadap orang yang melakukan numpang karang ini. Karena pemerintah Desa merasa kasihan kepada masyarakatnya dan ingin membantu masyarakatnya, dan perbuatan ini tergolong dalam kebaikan atau tolong menolong sesama umat manusia karena membantu orang yang membutuhkan bantuan dari segi formil dan materil, seperti firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:



*Artinya: dan dan tolong-menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Al-Maidah: 5 Ayat 2)*⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia diwajibkan untuk tolong menolong sesamanya, dalam berbuat kebaikan. seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini:

⁶ Achmad Sunarto, *Fiqih Islam Lengkap*, (Bandung: Husaini), cet. Ke-1, h. 436.

⁷ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, *op.cit*, h. 49.

عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فليرز عهال رليه ذ

ها اخاه فان لم يفعل فله سكار

Dari jabir bin abdullah RA, bahwa rosullulah SAW bersabda, “barang siapa di antara kalian orang yang memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya atau menyuruh saudaranya untuk menanaminya dan janganlah menyewakannya”. (HR. Bukhari).⁸

Berdasarkan penjelasan ayat di atas ialah barang siapa yang memiliki lahan yang tidak dirawat dan tidak ditanami maka hendaknya ia menyuruh saudaranya untuk menanami agar bisa membantu bagi orang yang membutuhkan dan tidak boleh menyewakannya, kepada orang yang membutuhkan bantuan.

Jadi dalam pelaksanaan numpang karang yang terjadi di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura, belum sesuai dengan hukum Islam ini dapat dilihat dari pemanfaatan lahan tersebut tidak disertai dengan akad biarpun lahan tersebut lahan dari pemerintah Desa namun dalam pelaksanaan harus mendapat izin dari pemerintah Desa, karena pemerintah Desa sebagai *musta'ir* (yang meminjamkan), atau pemerintah Desa yang memiliki kekuasaan penuh atas tanah Desa tersebut, bagi masarakat yang memanfaatkan tanah sosial Desa tersebut apabila ingin melaksanakan numpang harus mengetahui terlebih dahulu, syarat dan rukun dalam numpang karang, dan numpang karang dalam Fiqih Muamalah sama dengan dengan al-Ariyah (pinjam-meminjam) karena numpang karang ini memanfaatkan tanah tanpa ganti rugi dan tidak dikenakan biaya dalam pemanfaatanya dan ini dalam Fiqih Muamalah sama dengan al-Ariyah, namun biarpun tidak dikenakan biaya dalam pelaksanaan numpang karang ini si peminjam haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari pemilik tanah tersebut karena untuk menentukan sampai kapan si peminjam boleh memanfaatkan tanah tersebut, karena numpang karang sifatnya hanya

⁸Imam bukhari, *Soheh Bukhari Juz 3 dan 4*, (Beirut an-Nasri: Darul Fikri, 1981), cet. Ke-3, h. 72.

sementara saja dan dalam numpang karang diperbolehkan mengambil manfaatnya saja peminjam tidak memiliki sepenuhnya hanya memiliki manfaatnya itupun selama jangka waktu yang ditentukan oleh yang meminjamkan maka dari itu dalam numpang karang harus disertai dengan akad antara *musta'ir* (yang meminjamkan) dan *mu'ir* (peminjam) agar tidak terjadi persengketaan dikemudian hari. Dan apa bila kita meminjam tanah harus seizin yang punya seperti dalil berikut ini:

لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه

Artinya: “harta seorang muslim tidak halal bagi muslim lainnya kecuali dengan kerelaannya”⁹

Pengertian dalil di atas adalah bagi siapa saja yang meminjam sesuatu barang atau harta haruslah seizin pemiliknya, karena izin dari pemilik merupakan syarat utama bagi pemanfaatan suatu barang pinjaman, namun tidak seperti yang terjadi di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura dalam memanfaatkan numpang karang tidak ada izin dari pemerintah Desa setempat masyarakat langsung melakukan numpang karang ini dan perbuatan ini, tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena memanfaatkan tanah bukan milik pribadi sama halnya mencuri harta orang lain namun apabila memanfaatkan tanah tersebut dengan izin yang punya maka numpang karang ini dibenarkan oleh hukum Islam, karena dalam Islam diajarkan untuk tolong-menolong sesama umat manusia yang ada di dunia ini.

⁹ Akhmad Mudjab Mahalli Dkk, *Hadis-Hadis Muttafaq'alaihi*, (Jakarta: kencana, 2004), cet. Ke-2, h. 125.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisa dalam kajian ini, untuk menutup kajian ini maka perlu penulis membuat beberapa kesimpulan dari permasalahan penelitian ini sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan numpang karang yang dilaksanakan oleh sebagian individu masyarakat Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura yang dilaksanakan sampai sekarang ini, namun dalam pelaksanaannya masyarakat tidak meminta izin terlebih dahulu kepada aparat Desa setempat masyarakat langsung menggarap lahan tersebut tanpa memikirkan apa yang akan terjadi dikemudian hari, padahal tanah tersebut tanah untuk mendirikan fasilitas umum
- b. Apabila ditinjau dari perspektif Fiqih Muamalah, dalam pelaksanaan numpang karang ini, yang dilaksanakan di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura. Setelah diteliti sebenarnya dalam numpang karang ini dibenarkan oleh hukum Islam, karena membantu masyarakat yang tidak mampu, namun dalam pelaksanaannya dianggap belum sesuai dengan tata cara yang dianjurkan dalam hukum Islam ini dapat dilihat dari, tata cara pelaksanaannya tidak disertai dengan akad dan tidak menentukan jangka waktunya sampai kapan si peminjam boleh memanfaatkan lahan tersebut.

B. Saran-saran

Setelah penulis mengahiri permasalahan ini terlebih dahulu penulis memberikan beberapa saran-saran semoga bermanfaat

- a. Diharapkan kepada pihak yang terlibat pelaksanaan numpang karang ini hendaknya lebih memperhatikan tentang hukum dan status dalam hak numpang karang ini yang sesuai dalam syariat Islam/hukum Islam yang mengatur permasalahan numpang karang ini sehingga masyarakat yang terlibat pelaksanaan numpang karang di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura atau pemerintah Desa setempat tidak ada yang dirugikan.
- b. Diharapkan juga kepada pihak pemerintah Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura, agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan numpang karang di Desa Srigading, agar masyarakat Desa Srigading yang terlibat numpang karang memahami hukum dari hak numpang karang dan dalam memberikan hak numpang karang kepada masyarakat yang kurang mampu supaya dijelaskan aturan-aturannya yang sesuai dengan syariat Islam, kepada masyarakatnya supaya dikemudian hari tidak ada persengketaan antara masyarakat dengan pemerintah Desa setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- AL-Fauzan Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet. 1.
- Al-Alabij Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), cet. 2.
- Al-Jazairi Syaikh Abubakar Jabir, *Minhajul Muslim*, (Madinah: Maktabatul'ulum Wal Hikam, 1419 H), cet. 6.
- Al-Albani Muhammad Nashiruddin, *Shohih Sunah Abudaud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. 2.
- Akhmad Mudjab Mahalli Dkk, *Hadis-Hadis muttafaq'alah*, (Jakarta: kencana, 2004), cet. 2.
- Bukhari Imam, *Soheh Bukhari Juz 3 dan 4*, (Beirut: an-Nasri Darul Fikri, 1981), cet. 3.
- Bin Ismail Imam Abi Abdilah Dkk, *Soheh al- Bukhari, Jilid 5*, (Beirut: an-Nasri Darul Fikri, 1994), cet. 3.
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Diponegoro: al-Quran Hikmah, 2007), cet. 1.
- Data/Profil Desa Srigading, 2 April 2010.
- Hasneni, *Fiqih Muamalah*, (Bukit Tinggi: STAIN Press , 2002), cet. 3.
- Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), cet. 1.
- <http://makalah-fifacom.blogspot.com/2010/02/pinjam-meminjam.html>.
- Husain at-Tariqi Abdullah abdul, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), cet. 1.
- Muhamad Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang PT: Karya Toha Putra, 1978), cet. 1.
- Markus Gunawan, Gunardi, *Kitab Undang-Undang Hukum Kenotarisian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), cet. 1.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), cet. 1.
- Syarifun Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta timur: Kencana, 2003), cet. 1.
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), cet. 1.
- Subekti R.Tjitrosudibyo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), cet. 38.
- Sunarto Achmad, *Fiqih Islam Lengkap*, (Bandung: Husaini), cet. 1.

Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), cet. 4.

Vollmar A.F.H, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali, 1992), cet. 2.



ERWIN SUPRAPTO S.H.I

Lahir di cilacap, 18 November 1986. Jenjang pendidikan formal yang di tempuh, SDN 034 di Srigading (1994-1999), SMPN 1 Kerincikanan (1999-2002), SMUN 1 di Lubuk Dalam (2002-2005), kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi UIN Sultan Syarifkasim Riau (2006-2010). Dan selama di perkuliahan aktif di Organisasi KOMANDO RESIMEN MAHASISWA (MENWA), Satuan 042/IB UIN Suska Riau, dengan jenjang pendidikan, DIKSARMIL, (2007), SUSKALAK, (2009), SUSKAPIN, (2010), dan jabatan terakhir Kepala Seksi I Intellijen dan Pengamanan MENWA UIN Suska Riau Priode (2009-2010).

Penulis melaksanakan kuliah kerja nyata tahun 2009 di Kabupaten Indra Giri Hulu, tepatnya di Kecamatan Sei Lala selama dua bulan dan penulis juga pernah pelatihan di Pengadilan Negri kelas I A pekanbaru, dan Pengadilan Agama kelas I A Pekanbaru masing-masing selama dua hari, dan pada tanggal 10 Juni 2010 penulis di nyatakan lulus sarjana hukum islam, dengan judul Skripsi: **"HAK NUMPANG KARANG DI TINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH"** (Studi Kasus Di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura), dibawah bimbingan bapak Drs, H. A. Syafii Jafri.